

SEJARAH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretariat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
6. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
7. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
8. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
9. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
10. Inspektorat Jenderal
11. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
12. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
13. Staf Ahli

26 Oktober
Keputusan Presiden Nomor 355/M:
Mangkat Menteri Eksplorasi Laut

10 November
Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999:
Membentuk Departemen Eksplorasi Laut (DEL)

1 Desember
Keputusan Presiden Nomor 145:
Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi
Laut dan Perikanan

Keputusan Presiden Nomor 147:
Perubahan nomenklatur DEL menjadi Departemen
Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP)

23 November

- Keputusan Presiden Nomor 165:
Perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP)

- Keputusan Presiden Nomor 177:
Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
 1. Menteri Kelautan dan Perikanan
 2. Sekretaris Jenderal
 3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran
 7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 8. Inspektorat Jenderal
 9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
 10. Staf Ahli

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 dan Nomor 94 Tahun 2006:

Perubahan struktur organisasi

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektorat Jenderal
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Kelautan dan Perikanan
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
11. Staf Ahli

Peraturan Presiden
Nomor 47:

Perubahan nomenklatur
dari Departemen Kelautan
dan Perikanan (DKP)
menjadi Kementerian
Kelautan dan
Perikanan (KKP)

Peraturan Presiden
Nomor 63:
Menambahkan
Inspektorat Jenderal
sebagai unsur
pengawasan internal
kementerian

1999

2000

2005-2006

2009

2015

2025

2024

2023

2017

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2:

- Pemisahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjadi:
 1. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Keputusan Presiden Nomor 73/M:
Pengangkatan Wakil Menteri
Negara Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024–2029

Peraturan Presiden Nomor 38:

- Penyesuaian nomenklatur
 1. Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 2. Perikanan Budi Daya
 3. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 4. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Fungsi riset dan inovasi dialihkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Fungsi Karantina Ikan dialihkan kepada Badan Karantina Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 2:
Penyesuaian nomenklatur:

1. Pengelolaan Ruang Laut
2. Perikanan Budidaya
3. Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
4. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Sejarah



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun

2001-
2005

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut (P2L) yang kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari Sekretariat Ditjen, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Ikan, Direktorat Pengawasan Jasa Kelautan, Direktorat Pengawasan Ekosistem Laut, Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan, Direktorat Penanganan Pelanggaran

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan 6 Unit Kerja Eselon II yaitu Sekretariat Ditjen, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Ikan, Direktorat Pengawasan Jasa Kelautan, Direktorat Pengawasan Ekosistem Laut, Direktorat Sarana dan Prasarana

Tahun

2001-
2005

Tahun

2005-
2010

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) yang terdiri dari Sekretariat Ditjen, Direktorat P2SDK, Direktorat P2SDP, Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Kapal Pengawas dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Tahun 2006 dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 2 Pangkalan PSDKP di Jakarta dan Bitung, serta 3 Stasiun PSDKP Belawan, Pontianak, dan Tual.

Tahun

2010-
2015

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terdiri dari Sekretariat Ditjen, Direktorat Pengawasan SDK, Direktorat Pengawasan SDP, Direktorat Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan, Direktorat Kapal Pengawas dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Tahun 2015 terdapat penyesuaian nomenklatur Eselon II menjadi Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK, Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP, Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Tahun

2016-
Sekarang

Penguatan kelembagaan UPT PSDKP menjadi 6 Pangkalan PSDKP di Lampulo, Batam, Jakarta, Benoa, Bitung, Tual, serta 8 Stasiun PSDKP di Belawan, Pontianak, Cilacap, Tarakan, Tahuna, Ambon, Kupang dan Biak





PANGKALAN PSDKP TUAL

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Sejak berdiri, kepemimpinan Pangkalan PSDKP Tual telah diemban oleh sejumlah pejabat sebagai berikut:

- Yospendi, S.T., S.Sos. – Kepala Stasiun SDKP Tual pertama (11 Mei 2006 September 2010),
- Subagianto, S.Pi. – Kepala Stasiun SDKP Tual kedua (September 2010 – 26 Maret 2013),
- Basri, A.Pi.M.Si. – Kepala Stasiun SDKP Tual ketiga (26 Maret 2013 – 5 September 2015),
- Mukhtar, A.Pi. M.Si. –Kepala Stasiun SDKP Tual keempat (5 September 2015 – 20 April 2017),
- Asep Supriadi, S.St.Pi. M.Si.- Kepala Stasiun SDKP Tual kelima (20 April 2017 – 13 Februari 2019),
- Salman Mokoginta, S.St.Pi,M.Si. – Kepala Pangkalan SDKP Tual pertama (19 Juni 2017 – 20 Desember 2019),
- Sigit Bintoro,S.Pi. – Kepala Pangkalan PSDKP Tual kedua (20 Desember 2019 – Maret 2025).
- Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si. ketiga (17 Maret 2025 – sekarang).



Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (Ditjen PSDKP)
Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia



Jl. Bukit Dumar No. 1, Kompleks
Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Tual, Kota Tual,
Provinsi Maluku 97611).

SATUAN PENGAWASAN

1. Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat
2. Satwas PSDKP Sorong
3. Satwas PSDKP Kaimana
4. Satwas PSDKP Mimika
5. Satwas PSDKP Merauke

Wilayah Kerja



REKAPITULASI SDM BERDASARKAN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

BERDASARKAN GOLONGAN

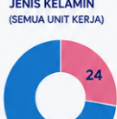


BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL
(SEMUA UNIT KERJA)

81
GRAND

ORANG
JABATAN PELAKSANA

BERDASARKAN

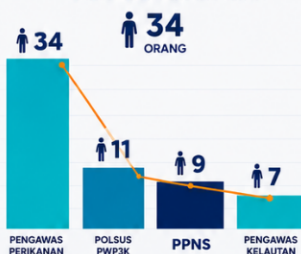


104

■ LAKI-LAKI (104 ORANG)
■ PEREMPUAN (24 ORANG)

SDM APARAT PENEGAK HUKUM

TOTAL APARAT PENEGAK HUKUM



TUGAS DITJEN PSDKP

Sebagai UPT Ditjen PSDKP, Pangkalan PSDKP Tual melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan, program, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.

**REKAP PENGADUAN PELAYANNA PUBLIK
TAHUN 2025 - 2026**

2025		2026	
Jenis Penangkapan Eksternal	Jumlah	Jenis Penangkapan Eksternal	Jumlah
1. Tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbaru Nomor 56/PERMEN-KP/2020 Nomor : B.1607/DJPSDKP.1/OT.710/V/2025	1	1. Aspirasi Nelayan Papua Selatan (Penolakan Kapal Trawl) Aspirasi (Sektor Perikanan) tidak lanjut 1091/DJPSDKP.1/OT.710/V/2026, tanggal 4 Mei 2026	Total 1
2. Nomor: B.2210/DJPSDKP.1/OT.710/VII/2025			
Pencurian ikan di Perairan Tayando Tam dengan menggunakan BOM/Alat destruktif lainnya (DF)	1	Jenis Penangkapan Internal	Jumlah
		1. Aspirasi Publik. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Nomor: 1699/DJPSDKP.1/OT.710/VI/2026, tanggal 2 Juli 2026. Pengaduan Span Lapur	Total 1
Total 2			

Total Pengaduan
Selama periode
Tahun 2025-2026

4 Pengaduan

• **ARMADA**



DOKUMENTAS

<https://drive.google.com/drive/folders/1KHlo27uMW9mzu1nhvW08XKj6HcaWfG6?usp=sharing>

Pangkalan
PSDKP Tugl

